

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 900/26 TAHUN 2023****TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/029 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/029 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/070 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/029 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/250/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/029 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/029 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/070 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/029 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/029 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/070 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/029 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ~~4 September~~ 2023.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9.0/26 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/029 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	NAMA, NIP & JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4
1	a. PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG/PEJABAT YANG BERWENANG MENGESEHAKAN SPJ	SLAMET, AK NIP. 19660215 198603 1 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	
2	a. Bendahara Pengeluaran PPKD	DIEN PAMELASHI, SH, MM NIP. 19831205 200501 2 001 Stat Sub Bagian Keuangan	1 Belanja Bunga 2 Subsidi 3 Belanja Bagi Hasil 4 Bantuan Keuangan 5 Belanja Tidak Terduga 6 Pengeluaran Pembiayaan
	b. Bendahara Penerimaan PPKD	NUGROHO SURATNO PUTRO, SE NIP. 19850120 200903 1 005 Stat Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2 Dana perimbangan 3 Lain-lain pendapatan yang sah 4 Pembiayaan penerimaan
	c. Bendahara Pengeluaran SKPD	LUSI AGUSTIN DWISARI, SE, AKT NIP. 19790828 200604 2 008 Stat Sub Bagian Keuangan	A. Kantor Induk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

NO	URAIAN	NAMA, NIP & JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			<ul style="list-style-type: none"> 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			<ul style="list-style-type: none"> 4 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			<ul style="list-style-type: none"> 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Alat Besar - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			<ul style="list-style-type: none"> 6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			<ul style="list-style-type: none"> 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			<p>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

NO	URAIAN	NAMA, NIP & JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota - Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota - Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota - Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
			<p>B. Unit Pengelola Asrama Donohudan</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>1 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	URAIAN	NAMA, NIP & JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4
d	Bendahara Penerimaan SKPD	SUPARMANTO NIP. 19770215 200801 1 007 Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
c	Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD	SUMARDI, SH NIP. 19730608 199903 1 004 Staf Bidang Aset	<p align="center">BIDANG ASET DAERAH</p>
f	Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD	ENDANG PARIASIH NIP. 19770201 200801 2 009 Staf Unit pengelola Asrama Donohudan	<p align="center">UNIT ASRAMA DONOHUDAN</p>
3	a KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG	DWIANTO PRIYONGROHO, M.Prof.Ac NIP. 198012212006041010 Kepala Bidang Anggaran	<p align="center">PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>1 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi
b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DIEN PAMELASIH, SH, MM NIP. 19831205 200501 2 001 Staf Sub Bagian Keuangan	
4	a KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG	SLAMET, AK NIP. 19660215 198603 1 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	<p align="center">PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>1 Kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SIANITA TRI HARDANINGRUM, SE NIP. 19810901 200604 2 010 Staf Sub Bagian Keuangan	

NO.	URAIAN	NAMA, NIP & JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4
b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PUJI ARSIANTI, SE NIP. 19650415 199303 2 007 Staf Sub Bagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Barang Milik Daerah - Inventarisasi Barang Milik Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah - Penilaian Barang Milik Daerah - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

GOVERNOR OF CENTRAL JAWA,



GANJAR PRANOWO